



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
**UNIT KERJA** : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JAYASNI SALIM  
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMASARAN DAN INFORMASI  
3. NHK : 639000

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 780.000.000

1. Tanah Seluas 3.000 m2 di KAB / KOTA MAMASA, WARISAN Rp. 200.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2.975 m2/256 m2 di KAB / KOTA MAMASA, WARISAN Rp. 450.000.000  
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 9.000.000

1. MOTOR, HONDA MH1JM3113HK148025 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 29.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 44.932.733

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 5.000.000

**Sub Total** Rp. 867.932.733

**III. HUTANG** Rp. 94.440.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 773.492.733

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.